

PERAN QUADRUPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KAWASAN WISATA CISARUA-LEMBANG

Vira Oktaviani Rezqy

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: vira.17081194042@mhs.unesa.ac.id

Khusnul Fikriyah

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: Khusnulfikriyah@unesa.ac.id

Abstrak

Pengembangan pariwisata halal menggunakan konsep Quadruple Helix merupakan konsep yang memadukan peran empat aktor dalam mendukung program pengembangan pariwisata halal. Konsep ini membagi peran Pemerintah, Akademisi, Swasta, dan Komunitas untuk menjadi suatu kolaborasi yang baik dalam pengembangan pariwisata halal di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para aktor Quadruple Helix dalam pengembangan pariwisata halal di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang. Dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Quadruple Helix dalam pengembangan wisata halal Kawasan Wisata Cisarua-Lembang masih belum berperan secara optimal dan belum terjalin kerjasama yang signifikan diantara aktor-aktor Quadruple Helix.

Kata Kunci: Quadruple Helix, Pariwisata Halal, Pengembangan, Kawasan Wisata.

Abstract

The development of halal tourism using the Quadruple Helix concept is a concept that combines the roles of four actors in supporting the halal tourism development program. This concept divides the roles of the Government, Academics, Private sector and Community to become a good collaboration in the development of halal tourism in the Cisarua-Lembang Tourism Area. This study aims to determine the role of Quadruple Helix actors in the development of halal tourism in the Cisarua-Lembang Tourism Area. In this study using a qualitative descriptive research method using primary data and secondary data. Interviews, field observations, and documentation are data collection techniques used in this study. The results of this study indicate that the role of the Quadruple Helix in the development of halal tourism in the Cisarua-Lembang Tourism Area has not played an optimal role and there has not been significant cooperation among Quadruple Helix actors.

Keywords: Quadruple Helix, Halal Tourism, Development, Tourism Area

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan suatu Negara sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting. Pada tahun 2015, industri pariwisata menyumbang devisa sebesar Rp. 175,71 Triliun dengan menduduki peringkat ke empat penyumbang devisa terbesar (Kementerian Pariwisata, 2018). Pada tahun 2018, devisa yang disumbangkan oleh sektor pariwisata naik menjadi Rp. 224 Triliun (Kementerian

Pariwisata, 2018). Selain itu, pariwisata memiliki *multiplier effect* yaitu pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas melalui sektor ekonomi lain yang terikat, seperti hotel, restoran, industri kerajinan, dan moda transportasi. Dayana (2017) melakukan penelitian terkait pariwisata dengan menyimpulkan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha cinderamata di Kota Mataram. Ramadhany dan Ridlwan menjelaskan bahwa dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang signifikan di tahun 2015 dapat menjadi tolak ukur meningkatnya pendapatan masyarakat Lombok, oleh karena itu dengan adanya pariwisata syariah di Lombok berimplikasi baik terhadap kesejahteraan masyarakat (Ridlwan, A & Ramadhani, 2018).

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim 207.176.162 juta jiwa pada tahun 2010, memiliki peluang yang besar untuk menjadi produsen wisata halal di Dunia. Wisata halal merupakan segmen wisata yang menyediakan pelayanan untuk mempermudah wisatawan muslim dalam melakukan perjalanan wisata sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketersediaan makanan dan minuman halal, ketersediaan tempat ibadah bersih, dan penginapan yang terhindar dari perbuatan maksiat.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan Islamic Tourism yaitu perjalanan berlibur dengan memberikan fasilitas pelayanan tambahan untuk para wisatawan-wisatawan muslim. Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai lembaga pengembangan wisata halal mendefinisikan wisata halal merupakan pariwisata yang dijalankan berpedoman pada prinsip syariah yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan layanan ramah wisatawan muslim (Subarkah, 2018).

Di Indonesia pertumbuhan pariwisata halal pada tahun 2018 sebesar 18%, dengan jumlah wisatawan mancanegara muslim yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019). Kementerian Pariwisata menargetkan pada tahun 2019 terdapat 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata pada tahun 2018 membentuk tim pengembangan 10 destinasi halal prioritas nasional dan pada tahun 2019 mengikutsertakan 6 Kabupaten/Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Cianjur (Kementerian Agama, 2019).

Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten prioritas pariwisata halal telah mendatangkan Nota kesepakatan Nomor: NK.35/KEMPAR/2019 dengan Kementerian Pariwisata mengenai Pengembangan pariwisata halal di kabupaten bandung barat. Dalam form isian desain strategi dan rencana aksi Jawa Barat (DSRA) 45% wisata unggulan di Bandung Barat terletak di Kecamatan Cisarua dan Lembang. Adapun wisata unggulan tersebut meliputi wisata alam, ekowisata, budaya, dan kuliner.

Wilayah Cisarua dan Lembang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah dan cuaca sejuk yang menenangkan sehingga sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Namun, daerah tersebut mempunyai risiko tinggi akan terjadinya gempa bumi karena keterdapatannya patahan lembang di sebelah utara. Dr. Irwan Meilano sebagai pembicara dalam Geoseminar dengan tema “Patahan Lembang: Fakta dan Realita” telah melakukan studi geodesi dan memperkirakan *slip rate* patahan Lembang sebesar 6mm/tahun dan berdasarkan *Seismic Hazard Analysis*, patahan Lembang berpotensi menghasilkan gempa dengan magnitude mencapai 6.8. Menurutnya jika di masa yang

akan datang kejadian gempa tersebut bena-benar terjadi, maka akan berdampak seperti kerusakan bangunan, fasilitas, hingga timbulnya korban (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2020).

Bencana longsor kerap terjadi di daerah Cisarua dan Lembang. Pada 24 Desember 2020 telah terjadi bencana longsor di Desa Jayagiri, Lembang yang menyebabkan tertimbunnya dua rumah dan empat orang. Bencana tersebut memakan satu orang korban jiwa, dan tiga orang lainnya luka ringan (Apriyono, 2020) Dua hari setelah longsor di Desa Jayagiri, terdapat longsor di tanjakan Curug Cimahi jalan Lembang-Cisarua yang diduga disebabkan karena intensitas air hujan yang turun cukup lebat hingga membuat pondasi tanah di kawasan tersebut terkikis, adanya kejadian tersebut mengakibatkan ditutupnya wisata Curug Cimahi dan mengakibatkan kemacetan pada jalan utama (Rachmadi, 2020)

Sepanjang tahun 2019-2020 Kepolisian Resor Cimahi mencatat hingga bulan Mei 2020 terdapat 6.896 botol minuman beralkohol, 280 botol ciu, dan 219 liter tuak yang disita di wilayah Kabupaten Bandung Barat (Nursaniyah, 2020). Bulan Juni 2020 Kepolisian menangkap pelaku yang menjual daging babi hutan di kampung gunung bentang, Kabupaten Bandung Barat. Daging tersebut mereka jual ke beberapa pedagang bakso di wilayah pariwisata Bandung Barat (Budi, 2020). Kasus-kasus tersebut merupakan bukti masih banyaknya rumah makan yang belum mendapatkan sertifikasi halal disekitar wilayah wisata. Fenomena yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya tentu tidak sesuai dengan syarat-syarat pariwisata halal yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Motivasi penulis dalam meneliti tema ini karena banyaknya permasalahan akses jalan, kurangnya kesadaran sertifikasi halal, dan adanya penjualan minuman beralkohol yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke daerah Cisarua-Lembang (Kosasih, Wawancara, 28 Maret 2021). Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam mewujudkan pariwisata halal di Kabupaten Bandung Barat melalui pengembangan, pembinaan, dan pemeliharaan oleh seluruh aktor *Quadruple Helix*. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran aktor *Quadruple Helix* dalam merealisasikan program pengembangan pariwisata halal di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang pendekatannya menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari subjek yang diamati (Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan metode *field reseach* untuk memahami masalah yang diteliti secara langsung dengan terjun ke tempat penelitian untuk mencari informasi terkait pariwisata halal di kawasan wisata lembang.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada peran *quadruple helix* yang meliputi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, akademisi Program Studi DIII Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Bandung, pihak swasta Dusun Bambu, Ciwangun Indah Camp, Floating Market, dan Kelompok Sadar Wisata selaku komunitas penggerak wisata dalam mengembangkan, menerapkan, dan mematuhi standar wisata halal Global Muslim Travel Index.

Data primer dan data sekunder merupakan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak Disparbud Kabupaten Bandung Barat, Akademisi UPW POLBAN, Dusun Bambu, Ciwangun

Indah Camp, Floating Market, dan Kelompok Sadar Wisata selaku komunitas penggerak wisata. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa gambar dan dokumen yang diberikan oleh pihak informan.

Objek dalam penelitian ini adalah Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang. Sedangkan Subjek penelitian meliputi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, Akademisi UPW POLBAN, Dusun Bambu, Ciwangun Indah Camp, Floating Market, dan Kelompok Sadar Wisata selaku komunitas penggerak wisata.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mewawancarai Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat, Akademisi dari Politeknik Negeri Bandung, *Human Resources* Dusun Bambu, *Costumer Service* Floating Market, *Owner* Ciwangun Indah Camp, dan Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan peneliti dengan terjun langsung melihat kondisi-kondisi tempat wisata di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang. Dan pengambilan dokumentasi berupa gambar dan dokumen terkait destinasi wisata untuk memperoleh data yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber yang memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2010). Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik *purposive sample* dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam teknik *purposive* kriteria informan sebagai berikut : (1) Pihak pemerintah yang bertugas dalam program pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bandung Barat, (2) Akademisi kampus yang memiliki program studi kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat. (3) Pihak swasta yang menjadi target wisata halal unggulan dalam Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat 2019. (4) Komunitas yang bergerak dalam mengelola tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat.

Peneliti menggunakan teknik validasi data triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menjamin keabsahan data. Triangulasi sumber yang digunakan adalah peneliti membandingkan informasi yang disampaikan oleh informan pada waktu wawancara pertama dan waktu wawancara kedua dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya keabsahannya. Triangulasi metode yaitu peneliti membandingkan data hasil wawancara informan dengan data hasil pengamatan di lapangan penelitian.

Analisis data kualitatif Miles dan Hubberman merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani et al., 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah

Pada konsep *quadruple helix* pemerintah sebagai aktor penting dalam pengembangan wisata halal diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pihak akademisi, swasta, dan komunitas masyarakat untuk saling berkolaborasi memberikan dukungan dalam pengembangan wisata halal. Peran Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam pengembangan wisata halal dapat dinilai dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut (Resdiana & Sari, 2019) :

1. Penyiapan Sistem Perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dijemputi Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat 2019 telah melakukan perencanaan tata ruang kawasan wisata halal di Cisarua dan Lembang. Adanya program pengembangan pariwisata halal, pemerintah daerah telah mensosialisasikan terkait tata ruang kawasan wisata halal kepada beberapa *stakeholder* seperti Akademisi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Bisnis wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui *forum grup discussion* (FGD) di Maso Pine hotel Kota Baru Parahyangan pada tahun 2019 (Davit Oot, S.E, M.Si, Wawancara, 8 Maret 2021). Sebagai Langkah awal pemerintah daerah untuk program pariwisata halal, pemerintah telah mengidentifikasi peluang kawasan wisata industri halal di Bandung Barat , diantaranya :

Tabel 1. Kawasan Wisata Unggulan Jawa Barat 2020-2022

Kawasan Wisata Halal	Tema Kawasan	Atraksi Unggulan
Kec. Lembang	Hijab Swimming Pool	Floating Market
Kec. Lembang	Objek wisata	The Lodge Maribaya
Kec. Lembang	Taman wisata	Grafika Cikole
Kec. Cisarua	Ekowisata	Dusun Bambu
Kec. Lembang	Objek wisata	Maribaya Hot Spring Resort
Kec. Lembang	Kawasan Wisata	Cikahuripan Lembang
Kec. Padalarang	Objek wisata	Situ Ciburuy
Kec. Rongga	Objek wisata	Curug Malela
Kab. Bandung Barat	Objek wisata	Hotel
Kab. Bandung Barat	Objek wisata	Restoran
Kec. Cikalong Wetan	Agrowisata	Bukit Senyum
Kec. Cikalong Wetan	Objek wisata	Sindang Geulis Cikahuripan
Kec. Cikalong Wetan	Objek wisata	Situ Lembang Danau

Sumber : Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat 2020-2022.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019

Pemerintah mendata terdapat 11 wisata unggulan yang dapat dijadikan sebagai wisata halal yang terdapat di lima kecamatan. Di kecamatan lembang terdapat enam wisata unggulan dan satu desa wisata yaitu Maribaya, Sari Ater, Floating Market, Grafika Cikole, Cikahuripan dan desa wisata ramah muslim cibodas. Sedangkan di Kecamatan Cisarua terdapat wisata alam Curug Pelangi, dan wisata alam buatan Dusun Bambu (Kementerian Pariwisata, 2019). Terkait jalur evakuasi bahaya sesar Lembang yang mengintai wilayah Cisarua dan Lembang telah dibuatkan tanda jalur evakuasi di beberapa tempat wisata.

2. Akseibilitas

Akseibilitas destinasi wisata menjadi hal yang penting, mengingat jalan Cisarua dan Lembang termasuk jalan yang terjal dan sering terjadi bencana longsor. Dalam memenuhi akseibilitas ini pihak pemerintah masih belum memenuhi perannya dikarenakan terdapat beberapa akses menuju tempat wisata yang mengalami kerusakan jalan dan adanya jalan yang longsor mengakibatkan kemacetan di daerah wisata Cisarua selama lebih dari enam bulan. Kepala Bidang Kepariwisata Bandung Barat yaitu bapak Davit menjelaskan bahwa :

“Kita tetap mengupayakan 3A (Atraksi, Akseibilitas, dan Amenitas) itu harus mumpuni. Namun dalam hal kewenangannya seperti contoh akseibilitas jalan itu kewenangannya dinas PUPR. Namun karena pandemi jadi anggaran berkurang untuk perbaikan sarana prasarana” (David Oot, S.E, M.Si, Wawancara, 8 Maret 2021).

Resdiana & Sari (2019) menyatakan akseibilitas destinasi wisata merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu daerah wisata. Adanya pengurangan anggaran pada masa pandemi di berbagai sektor menyebabkan tertundanya perbaikan sarana prasarana menuju ke destinasi wisata.

3. Pemenuhan Fasilitas

Fasilitas pemenuhan sertifikasi halal, fasilitas komunitas untuk berkembang, dan fasilitas kesehatan di kawasan wisata Cisarua dan Lembang. Pemerintah daerah telah memberikan fasilitas kesehatan meliputi puskesmas dan bantuan sejumlah alat kesehatan pada komunitas Pokdarwis selaku pengelola tempat wisata pada masa pandemi. Adapun terdapat dukungan amenitas berupa fasilitas penginapan dan rumah makan di Bandung Barat diantaranya :

Tabel 2. Dukungan Komunitas

No	Deskripsi	Jumlah di Bandung Barat
1	Hotel Bintang	9
2	Hotel Non-Bintang	89
3	Restoran dan Rumah Makan	71
4	Biro Perjalanan Wisata	
5	Cabang Biro Perjalanan Wisata	25
6	Agen Perjalanan Wisata	

Sumber: Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat 2020-2022.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat sembilan hotel Bintang dan 89 hotel non-bintang, sedangkan terdapat 85 Rumah makan dan restoran di sekitar Bandung Barat (Kementerian Pariwisata, 2019). Dalam Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat tidak terdapat Restoran Hotel, Rumah Makan, *Catering*, dan Rumah Potong Hewan yang sudah tersertifikasi halal. Namun, Davit selaku Kepala Bidang Kepariwisata menyatakan

“Mengenai data usaha yang telah tersertifikasi halal LPPOM MUI itu ada dalam DSRA dan kalau tidak salah baru ada 3 usaha yang terdaftar sertifikasi halal” (Davit Oot, S.E, M.Si, Wawancara, 8 Maret 2021).

Di Bandung Barat terdapat tiga usaha yang tersertifikasi halal, diantaranya : Bakery Islam, berlokasi di Jl. Cimareme Indah No.215, Cimareme, Kec. Ngamprah. Kopi Burangrang Selatan, berlokasi di Kp. Lapang RT 02/05, Cikalong Wetan, dan Eco Pesantren. Peneliti mengecek kembali status kehalalan produk diatas dengan mencari sertifikat halal di website LPPOM-MUI dengan hasil produk bakery islam terdaftar pada LPPOM-MUI dengan nomer sertifikat 01201199851117, sedangkan produk kopi Burangrang Selatan dan Eco Pesantren tidak terdaftar di website sertifikasi halal. Masih

minimnya restoran atau rumah makan yang tersertifikasi halal menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan wisata halal, hal tersebut karena banyaknya rumah makan dan hotel yang terkendala dalam mengurus sertifikat layak sehat di Dinas Kesehatan sehingga untuk mengurus sertifikat halalnya terkendala. Peneliti kemudian menanyakan pada restoran Dusun Bambu dan *catering* Ciwangun Indah Camp. Herni selaku *Human Resources* Dusun Bambu menyatakan:

“Sejauh ini kami terkendala pada pengumpulan sertifikat-sertifikat yang menjadi syarat sertifikat halal, karena banyaknya suplyer kami yang belum memiliki sertifikat layak sehat maupun sertifikat halal” (Herni, Wawancara, 5 Maret 2021).

Sejauh ini belum ada bantuan fasilitas sertifikasi halal untuk rumah makan atau restoran dan masih dijadikan sebagai rencana program oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat.

Dalam mendukung program Sumber Daya Manusia berkualitas di sektor pariwisata, pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk masyarakat sekitar wisata berupa pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah dengan balai pelatihan seperti pelatihan pengelolaan homestay, dan pelatihan pengelolaan desa wisata. Namun, terdapat beberapa saran dari masyarakat dan komunitas Kelompok Sadar Wisata bahwasannya pemerintah sebagai fasilitator dapat memberikan bantuan yang nyata lainnya dan tidak hanya sebatas pemberian materi pelatihan saja.

4. Pembuatan regulasi,

Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai regulator menjelaskan bahwa belum ada regulasi tertulis mengenai pengembangan pariwisata halal dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat (RIPPARKAB). Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwasanya RIPPARKAB sedang dikaji ulang dan masih menjadi pertimbangan untuk memuat regulasi wisata halal dalam RIPPARKAB. Namun, terkait tata ruang kawasan wisata, strategi pengembangan wisata halal telah tercatat dalam Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) Jawa Barat 2019. Dalam DSRA Jawa Barat 2019 pemerintah daerah menargetkan pada tahun 2022 terdapat pengembangan dua kawasan pariwisata halal, 10 hotel yang tersertifikasi halal, 20 restoran memiliki sertifikasi halal, dan 1.500 orang tersertifikasi atau tersosialisasikan pariwisata halal (Kementerian Pariwisata, 2019).

Tabel 3. Target pengembangan Wisata Halal

No	Indikator	Jumlah di Bandung Barat
1	Wisatawan mancanegara muslim	12.000
2	Kawasan Wisata halal yang berkembang	2
3	Usaha wisata yang tersertifikasi halal	
	Hotel (dapur)	10
	Restoran	20
	BPW	1
	SPA	-
4	Paket Wisata Halal	5
5	SDM tersertifikasi/tersosialisasi Wisata Halal	1.500 orang

Sumber: Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat 2020-2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019

Dalam menunjang kesuksesan pembangunan dan pengembangan wisata halal faktor yang paling penting adalah peran pemerintah sebagai regulator dalam program ini. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan wisata halal dengan melibatkan banyak pihak untuk saling bekerjasama.

Peran Akademisi

Universitas berperan sebagai pabrik ilmu pengetahuan yang menyediakan temuan berbagai ilmu pengetahuan terutama mengenai wisata halal pada sektor publik dan sebagai tempat pengembangan Sumber Daya Manusia sejauh ini belum menerapkan wisata halal kedalam kurikulum pendidikan karena masih dalam kajian untuk dijadikan mata kuliah. Hal ini di jelaskan oleh Marceilla bahwa

“Belum ada sosialisasi mengenai pengembangan wisata halal oleh pihak pemerintah Bandung Barat kepada pihaknya. Namun, sejauh ini pihak DIII Usaha Perjalanan Wisata POLBAN telah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bandung Barat dalam event Kompetisi Pariwisata Indonesia tetapi belum ada surat perjanjian kerjasama. Sekarang ini (bulan februari) saya sedang menjajaki untuk kerjasama dengan DISPARPORA Kabupaten Sukabumi, PEMKOT Bandung, PEMPROV Jawa Barat, dan PEMKAB Bandung Barat. insyaAllah kita sedang jajaki pada bulan ini karena kami sedang mengurus mahasiswa kami untuk PKL Online” (Dr. Marceilla Suryana, BA (Hons), MM.Par, Wawancara, 2 Maret 2021).

Peneliti kemudian menemukan beberapa hasil penelitian terkait wisata halal yang telah dipublikasikan oleh pihak akademisi UPW POLBAN, diantaranya Identifikasi Potensi dan Prospek dalam pengembangan Wisata Halal di desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung (Suryana & Utomo, 2020), Pengaruh *Islamic Tourism* dalam Meningkatkan Word of Mouth Wisata Halal Sumatera Barat (Rafdinal & Amalia, 2019), Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Halal di Kota Bandung (Maryansyah, 2018). Hasil penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan persiapan yang dapat digunakan oleh pihak pemerintah, komunitas, dan pelaku bisnis.

Pihak UPW POLBAN telah menjalin kerjasama berkonsep *pentahelix* yang melibatkan pihak pemerintah, komunitas, pelaku bisnis, dan media. Sejauh ini Nota kesepahaman telah ditanda tangani pada tahun 2019 dengan jelajah nusa, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Kelompok Penggerak Pariwisata Soreang dengan mengusung kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi. Program kerjasama yang telah dilaksanakan meliputi pembuatan *Business plan*, penyelenggaraan Kompetisi Pariwisata Indonesia yang telah diselenggarakan selama 11 tahun, pengabdian masyarakat pelatihan *sustainable tourism*, pelatihan otomasi kantong bisnis perjalanan wisata, pelatihan event manajemen yang dihadiri oleh pengusaha-pengusaha event seluruh Indonesia.

Sebagai *helix* kedua Akademisi Prodi Usaha Perjalanan Wisata POLBAN memiliki peran sebagai pabrik ilmu pengetahuan yang menyediakan temuan berbagai ilmu pengetahuan mengenai wisata halal pada sektor publik, namun saat ini Program Studi UPW lebih banyak berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, dan pihak UPW Polban masih belum berperan signifikan

sebagai pabrik ilmu pengetahuan terkait wisata halal karena masih sangat minimnya hasil penelitian terkait wisata halal.

Peran Swasta

1. Dusun Bambu

Dalam Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat tahun 2019 dusun bambu terpilih sebagai salah satu wisata unggulan wisata halal di Bandung Barat. Herni selaku Human Resources & General Affair Admin menyatakan

“setelah adanya sosialisasi wisata halal oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Bandung Barat, dusun bambu sebagai pelaku industri siap berpartisipasi dalam program pengembangan pariwisata halal” (Herni, Wawancara, 19 Februari, 2021).

Dusun Bambu menyediakan berbagai macam wisata edukasi diantaranya area lembur urang, plaza kaulinan, saung leuit, saung kreatif, sanggar ambu, imah gede, menggarap sawah, amphitheater lembur urang, bebek kabayan, taman arimbi, galeri flora Indonesia, kopi nusantara, walini by me, sampan sangkuriang, tegal pangulinan. Berbagai macam wisata tersebut bertujuan untuk mengedukasi dan mengenalkan budaya sunda pada pengunjung terutama pengunjung berusia sekolah dan wisata tersebut termasuk kedalam wisata ramah keluarga.

Dusun bambu sebagai pihak swasta telah menerapkan standar wisata halal Global Muslim Travel Index (GMTI) diantaranya: Dusun Bambu telah menyediakan Layanan dan fasilitas ramah muslim diantaranya dua mushola yang terletak disetiap restoran dan satu masjid dengan kapasitas yang besar dengan terdapat area wudhu terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Peneliti kemudian mengecek kondisi masjid yang disediakan, namun ternyata pada sarana ibadah yang disediakan tidak ada kain penghalang antara jamaah perempuan dan laki-laki. Untuk kebersihan rumah ibadah sangat dijaga agar tetap bersih dan adanya tempat wudhu khusus laki-laki dan khusus perempuan sehingga perempuan dapat berwudhu tanpa khawatir auratnya terlihat oleh bukan mahramnya.

Pihak dusun bambu telah mendaftarkan sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang diperjual belikan pada pertengahan tahun 2020 dengan nomer pendaftaran 48343, proses pengajuan sertifikasi ini diajukan oleh dusun bambu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Sebelum mengajukan sertifikasi halal, restoran dusun bambu telah mendapatkan sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan Nomor: 440/002/Dinkes.

Untuk memberikan keamanan dan layanan yang sehat di masa pandemi, dusun bambu telah memperoleh sertifikasi Clean, Health, Safety, dan Environment Nomor : CHSE05307/2020 yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Fungsi adanya Sertifikasi CHSE yaitu sebagai jaminan kepada wisatawan terkait produk dan pelayanan yang diberikan pihak destinasi telah memenuhi protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pihak dusun bambu telah menerapkan peraturan bahwa setiap pengunjung dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang di kawasan wisata.

Terkait akomodasi penginapan pihak dusun bambu menyediakan penginapan bernuansa alam dan vila bernuansa budaya sunda, untuk pengunjung penginapan tidak diperkenankan membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan terdapat

pengecekan identitas karena pasangan yang belum menikah tidak diperizinkan untuk menginap. Terkait akses jalan menuju Dusun Bambu yang kurang nyaman, Herni menjelaskan bahwa :

“Itu jalan Kabupaten, tapi sejauh ini pihak kami yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan tersebut. Jadi setiap tahun kita memang memperbaiki jalan-jalan yang bolong terutama kalau menghadapi hari raya” (Herni, Wawancara, 19 Februari, 2021).

Kemudian peneliti mengecek kembali dengan mewawancarai kepala bidang kepariwisataan Bandung Barat yaitu bapak Davit menjelaskan bahwa:

“Kita tetap mengupayakan 3A (Atraksi, Akseibilitas, dan Amenitas) itu harus mumpuni. Namun dalam hal kewenangannya seperti contoh akseibilitas jalan itu kewenangannya dinas PUPR. Namun karena pandemi jadi anggaran pasti berkurang juga untuk perbaikan sarana prasarana” (David Oot, S.E, M.Si, Wawancara, 8 Maret 2021).

Namun, pihak Dusun Bambu selalu melakukan perbaikan jalan apabila terdapat jalan yang rusak menuju destinasi Dusun Bambu.

2. Ciwangun Indah Camp

Ciwangun Indah Camp (CIC) merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di kecamatan cisarua yang dikelola oleh CV. Ciwangun Indah Camp selama kurang lebih 17 tahun lamanya. CIC menyediakan produk wisata alam dengan konsep 3E (environment, education, and emotional). Dea Aini selaku manajemer Ciwangun Indah Camp menjelaskan rencana pengembangan wisata halal di Bandung Barat sebelumnya telah disosialisasikan kepada pihak CIC oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat pada tahun 2019, namun setelah adanya sosialisasi itu tidak ada pemberitahuan lanjut mengenai pengembangan wisata halal, karena di tahun 2020 hingga maret 2021 adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penutupan tempat wisata beberapa bulan yang lalu. Adapun kinerja Ciwangun Indah Camp dalam menerapkan standar wisata halal Global Muslim Travel Index diantaranya:

Ciwangun Indah Camp menyediakan berbagai macam wisata alam edukasi diantaranya paket outbound, paket fun games, paket menginap, dan paket minimalis yaitu kunjungan harian ke wisata air curug tilu leuwi opat dan perkebunan teh. Berbagai macam wisata tersebut bertujuan untuk mengedukasi dan mengenalkan kehidupan di alam bebas pada pengunjung terutama pengunjung pelatihan dari sekolah-sekolah.

Pihak CIC telah menyediakan layanan dan fasilitas ramah muslim yaitu satu mushola dan satu masjid, didalamnya disediakan mukena dan sarung. Masjid menjadi perhatian utama oleh pihak CIC, pasalnya pemilik CIC H. Kosasih menyatakan

“ketika pertama kali masuk ke kawasan CIC yang pertama menyambut itu masjid dekat dengan pintu masuk, karena memang kalau pengunjung datang dan pertama kali melihat masjid itu semoga mereka tenang tidak memikirkan bagaimana ibadah di kawasan hutan” (H.Kosasih, Wawancara, 28 Maret 2021).

Peneliti kemudian mengecek kondisi masjid dan kebersihan air untuk berwudhu, masjid dalam kondisi rapih dan terdapat pemandangan yang menyejukan. Namun,

tidak terdapat kain pemisah diantara tempat laki-laki dan perempuan dan tempat wudhu masih ditempat yang terbuka, sehingga jika perempuan hendak berwudhu namun takut terlihat auratnya lebih baik berwudhu di toilet yang disediakan di bawah masjid. Air yang disediakan untuk berwudhu sangat jernih karena air yang digunakan dari mata air pegunungan.

Pihak CIC sudah menyadari bahwasannya standar wisata halal sudah seharusnya diterapkan untuk memudahkan pengunjung muslim. Adapun kesadaran halal yang telah diterapkan meliputi perbaikan rumah ibadah, menetapkan aturan pelarangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun dalam menyediakan makanan dan minuman yang halal pihak CIC menjual paket makanan dari *catering* rumahan, namun terkait sertifikat layak sehat dan sertifikasi halal ibu Dea selaku manajer menerangkan :

“Kalau untuk peserta event kita menyediakan makanan dari catering rumahan dan itu karena homemade jadi belum mendaftarkan sertifikat halal ataupun layak sehat. Kemudian kami juga memiliki foodcourt yang kami sewakan pada masyarakat sekitar” (Dea Aini, Wawancara, 18 Maret 2021).

Untuk memberikan keamanan dan layanan yang sehat di masa pandemi, pihak CIC telah menyediakan berbagai macam spot cuci tangan di sekitar wisata alamnya. Untuk keamanan pengunjung pihak CIC menetapkan pelarangan membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang di kawasan wisata CIC. Oleh karena itu diberlakukan pengecekan pengunjung terlebih dahulu terkait barang bawaan sebelum memasuki kawasan wisata CIC.

Pihak CIC menyediakan tempat menginap *camping ground* dan vila. Setiap pengunjung yang menginap dilakukan pengecekan Kartu Identitas terlebih dahulu dan status pernikahannya. Namun, apabila pengunjung yang menginap merupakan peserta pelatihan atau *outbound* yang beranggotakan minimal 40orang maka hanya dilakukan pemeriksaan Kartu Identitas saja karena memang tempat bermalam Laki-laki dan Perempuan dipisah. Terkait akses jalan yang rusak, pihak CIC menjelaskan hingga saat ini perbaikan jalan masih dikerjakan oleh pihaknya karena memang jalan menuju kawasan wisata CIC adalah jalan pribadi milik owner CIC.

3. Floating Market Lembang

Floating Market Lembang merupakan objek wisata unggulan dalam Desain Strategi dan Rencana Aksi Jawa Barat 2019 dengan wisata unggulannya pasar terapung yang telah beroperasi sekitar 9 tahun dan mengusung tema sebuah desa yang memiliki danau. Floating market menyediakan wisata ramah keluarga meliputi pasar terapung, kota mini, kampung Jepang *Kyotoku*, taman kelinci, *rainbow garden*, miniatur kereta api, becak mini, *the rock*, wahana air, dan kampung leuit. Sebagai langkah awal dalam penerapan standar wisata halal, pihak Floating Market telah membuka wisata kolam renang tertutup khusus muslimah yang diberi nama *Hijab Swimming Pool* dan didalamnya sudah tersedia fasilitas mushola.

Adapun kinerja floating market lembangdalam menerapkan standar wisata halal Global Muslim Travel Index diantaranya: Pihak Floating Market telah menyediakan 12 mushola yang tersebar di beberapa titik dan terdapat mushola yang dipisah antara perempuan dan laki-laki. Untuk kebersihan rumah ibadah sangat dijaga agar tetap bersih

dan terdapat tempat wudhu khusus laki-laki dan khusus perempuan sehingga perempuan dapat berwudhu tanpa khawatir auratnya terlihat oleh bukan mahramnya.

Floating Market telah menyadari pentingnya standar halal pada destinasi wisatanya dengan membuka wisata *Hijab Swimming Pool* untuk perempuan yang ingin berenang namun tetap terjaga auratnya. Pilihan makanan dan jaminan halal menjadi salah satu indikator wisata halal. Di Floating Market menerapkan konsep wisata kuliner pasar terapung dengan 32 perahu yang menyajikan berbagai macam makanan tradisional seperti rujak, sate, dan masih banyak pilihan makanan lainnya. Terkait sertifikasi halal dan sertifikat layak sehat Melani Karnadi menjelaskan bahwa :

“Sertifikat layak sehat sudah ada namun mohon maaf tidak bisa kami lampirkan dokumennya, dan kalau sertifikat halal diusahakan oleh masing-masing vendor. Kemudian kami juga sudah memiliki sertifikasi Clean, Health, Safety, dan Environment (CHSE) yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pariwisata” (Melani Karnadi, Wawancara, 11 April 2021).

Peneliti kemudian mengecek beberapa vendor pada daftar produk halal yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI namun belum ada yang terdaftar sertifikasi halal (LPPOM MUI, 2019).

Untuk memberikan keamanan dan layanan yang sehat di masa pandemi, pihak Floating Market telah mendapatkan sertifikasi CHSE yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan hasilnya Floating Market telah tersertifikasi Clean, Health, Safety, Environment Nomor IL.04.02/2399/M-K/2020 yang berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan bahwa produk dan pelayanan yang diberikan telah memenuhi protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kemudian pihak Floating Market telah menetapkan peraturan pelarangan membawa dan mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan kawasan wisata Floating Market.

Pihak Floating Market tidak menyediakan penginapan, namun disekitar Floating Market terdapat hotel dan penginapan-penginapan lainnya untuk akomodasi wisatawan.

Peran Komunitas

Kelompok sadar wisata atau yang sering dikenal dengan sebutan Pokdarwis merupakan komunitas yang dibentuk oleh masyarakat yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Bandung Barat. Di Bandung Barat terdapat 41 Pokdarwis yang berisi sekitar 12 hingga 15 orang per Pokdarwisnya. Di daerah Cisarua dan Lembang terdapat kurang lebih 25 Pokdarwis. Komunitas Pokdarwis telah memiliki Surat Keputusan Bupati Bandung Barat pada 2 Januari 2020 sebagai pengelola tempat wisata.

Pada penyerahan Surat Keputusan Pokdarwis, berlangsung pembentukan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata sebagai wadah untuk anggota Pokdarwis berinteraksi dalam bertukar pikiran, mengemukakan pendapat, kritik dan saran. Januari 2020 Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:556/003-Disparbud tentang Pembentukan FORKOM Pokdarwis tahun 2020-2022 telah ditanda tangani oleh Bupati Bandung Barat.

Terkait tugas Pokdarwis diantaranya mengelola tempat wisata alam, bertanggungjawab mengenai protokol kesehatan, bertanggungjawab mengelola laporan terkait jumlah pengunjung tempat wisata yang kemudian dilaporkan pada Dinas

Pariwisata. Sedangkan tugas FORKOM Pokdarwis H. Kosasih, S.Ip. selaku ketua FORKOM Pokdarwis menyatakan:

“FORKOM tugasnya mengumpulkan stakeholder Pokdarwis di masyarakat yang ada di pedesaan dan Kecamatan. Dan satu kecamatan bisa lebih dari satu Pokdarwis, supaya tidak ada tumpang tindih kita daftarkan ke Dinas Pariwisata dan pendaftaran ini sebagai langkah kerjasama yang baik antara pengelola wisata dengan pemerintah daerah” (H.Kosasih, Wawancara, 28 Maret 2021).

Terkait pengembangan wisata halal di Bandung Barat pihak Pokdarwis telah diikuti sertakan dalam sosialisasi pengembangan wisata halal yang diadakan oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2019. Terkait perkembangan wisata halal di setiap destinasi yang dikelola oleh Pokdarwis, H.Kosasih selaku ketua menyatakan:

“Kalau tadi berkenaan dengan wisata halal, insyaAllah wisata disini 99% halal makanan dan minumannya karena dikelola oleh mayoritas muslim. Walaupun terdapat tamu mancanegara tapi tetap pelayanan menggunakan standar halal. Kemudian terkait sertifikasi halal coba tanyakan pada Dinas karena kita ga megang masing-masing” (H.Kosasih, wawancara, 28 Maret 2021).

Peneliti kemudian menanyakan pada pihak Disparbud Bapak Fredy selaku staf bidang kepariwisataan terkait sertifikasi halal Pokdarwis, beliau menyampaikan bahwa untuk sertifikasi halal untuk Pokdarwis masih belum ada hingga saat ini.

Dalam menerapkan standar wisata halal setiap Pokdarwis telah menetapkan peraturan pelarangan membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan kawasan wisata yang dikelola oleh Pokdarwis. Dalam menyediakan fasilitas rumah ibadah, setiap Pokdarwis telah menyediakan minimal satu mushola di setiap destinasi wisatanya. Terkait mengkonsumsi minuman beralkohol di kawasan wisata yang dikelola oleh Pokdarwis terdapat peraturan dan pengecekan barang bawaan pengunjung disetiap pintu masuk destinasi dan setiap tempat wisata tidak diperkenankan menyediakan minuman beralkohol.

Akses jalan menuju destinasi wisata menjadi salah satu indikator wisata halal. Banyaknya akses jalan yang rusak dan adanya jalan longsor menuju destinasi wisata, sejauh ini pihak Pokdarwis berinisiatif untuk menambal jalan-jalan yang berlubang dikarenakan masih belum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah terkait perbaikan jalan yang rusak dan longsor. Kemudian peneliti menanyakan kepada pihak Disparbud terkait akses jalan yang rusak menuju destinasi wisata, Davit Oot, S.E, M.Si menyampaikan

“Kita tetap mengupayakan 3A (Atraksi, Akseibilitas, dan Amenitas) itu harus mumpuni. Namun dalam hal kewenangannya seperti contoh akseibilitas jalan itu kewenangannya dinas PUPR. Namun karena pandemi jadi anggaran pasti berkurang juga untuk perbaikan sarana prasarana” (Davit Oot, S.E, M.Si, Wawancara, 8 Maret 2021).

Daerah Lembang dan Cisarua merupakan tempat yang rawan longsor dan gempa karena adanya kawasan Sesar Lembang. Terkait hal tersebut, pihak Pokdarwis telah mendapat sosialisasi bahaya Sesar oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan gladi ruang (TTX) dengan tema ancaman bahaya gempa aktivitas sesar lembang pada tahun 2019 menjadi salah satu kegiatan BNPB bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk mensosialisasikan bahaya sesar lembang pada masyarakat dan pengelola pariwisata di kawasan Lembang (Nugroho, 2019).

Pokdarwis sebagai komunitas yang diawasi secara langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentu diberikan pelatihan-pelatihan kepariwisataan oleh pihak Disparbud. Namun, pihak Pokdarwis berharap pelatihan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dapat membantu kegiatan operasional destinasi wisata. Karena sejauh ini fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baru sebatas pemberian Alat-alat protocol kesehatan.

Resdiana & Sari, (2019, mendefinisikan peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pengembangan wisata yang direncanakan oleh pemerintah. Dalam teori ini, masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Menurut hasil wawancara dan observasi memang kelompok sadar wisata selalu diikuti sertakan dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Disparbud seperti pelatihan *homestay*, pemberian alat kesehatan, sosialisasi wisata halal.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran aktor *Quadruple Helix* (Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan Komunitas) dalam upaya pengembangan wisata halal di Kawasan Wisata Cisarua dan Lembang belum berperan secara optimal dan belum terjalin kerjasama yang signifikan diantara para aktor. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata halal membutuhkan kerjasama yang terkoordinasi dan konsisten oleh aktor-aktor dalam pengembangan wisata halal sehingga wisata halal di Kabupaten Bandung Barat akan tercapai. Adapun peran Aktor *Quadruple Helix* sebagai berikut :

Dalam program pengembangan wisata halal peran pemerintah masih belum maksimal, hal tersebut dilihat dari akses jalan menuju beberapa destinasi wisata sangat rusak dan bahkan terkena longsor sehingga menimbulkan kemacetan. Kemudian belum adanya regulasi yang memuat mengenai pemenuhan indikator wisata halal sehingga masih banyak perusahaan swasta yang belum membuat sertifikasi halal rumah makan.

Peran swasta dalam pengembangan wisata halal telah membuat destinasi wisata ramah muslim seperti kolam renang tertutup untuk muslimah, dan penyediaan fasilitas rumah ibadah dan pelarangan minuman beralkohol telah diterapkan. Namun, masih ada beberapa perusahaan swasta yang belum memiliki sertifikat layak sehat dan sertifikat halal untuk makanan dan minuman yang mereka jual. Peran akademisi lebih dominan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, dan pihak Akademisi belum berperan sebagai pabrik ilmu pengetahuan terkait wisata halal karena masih sangat minimnya hasil penelitian terkait wisata halal. Sedangkan Komunitas masyarakat secara mandiri mampu untuk mengelola tempat wisata sesuai dengan indikator wisata halal, namun makanan yang dijual di kawasan wisata belum memenuhi sertifikasi halal.

Adapun peneliti melihat masih banyak potensi yang perlu di kembangkan maka pihak pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan dapat lebih aktif dan komunikatif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program pengembangan wisata halal. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu membuat regulasi pengembangan wisata halal dan secara transparan dapat memberikan data-data terkait wisata halal pada masyarakat mengingat data terkait wisata halal masih sangat susah ditemukan. Pihak akademisi diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang profesional di bidang wisata halal sehingga dapat berkontribusi dalam program pengembangan wisata halal. Pihak komunitas diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memenuhi standar wisata halal seperti sertifikasi halal pada makanan dan minuman dan sertifikat layak sehat. Pihak swasta diharapkan dapat berperan aktif dalam memenuhi standar wisata halal sertifikasi halal pada makanan dan minuman mengingat masih banyak pihak swasta yang belum memiliki sertifikat halal.

5. REFERENSI

- Apriyono. (2020). Longsor di Lembang Bandung, 1 Orang Tertimbun Masih Dalam Pencarian - Regional Liputan6. *Liputan6*.
- Badan Geologi Kementerian ESDM. (2020). Pusat Survei Geologi - Badan Geologi. *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*.
<https://psg.bgl.esdm.go.id/survei/sumber-daya-minyak-dan-gas-bumi>
- Budi, C. (2020). Kronologi Terbongkarnya Pasutri Jual Daging Celeng Oplosan di Bandung Halaman all - Kompas. *Kompas.Com*.
- Dayana, H. D. (2017). *Pengaruh Wisata Syariah Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Cinderamata Di Kota Mataram*.
- Hardani., D. (2020). *Kualitatif & Kuantitatif* (Hu. Abadi (ed.)). Pustaka Ilmu.
- Kementerian Agama. (2019). Indonesia Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019 Kementerian Agama RI. *Kemenag.Go.Id*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). 5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019. *Kominfo.Go.Id*.https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern+et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
- Kementerian Pariwisata. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemetrian Pariwisata 2018. In *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul* (Vol. 53, Issue 9).
- Kementerian Pariwisata. (2019). *Desain strategi dan rencana aksi / dsra pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat 2020-2022*.
- LPPOM MUI. (2019). *Pencarian Produk Halal*. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/ceklogin_halal/produk_halal_masuk/1
- Maryansyah, H. (2018). Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Halal di Kota Bandung. *Politeknik Negeri Bandung*, 1–2.
- Moleong. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. P. (2019). TTX hadapi ancaman gempa akibat sesar lembang. *Bnpb*.
<https://www.bnpb.go.id/ttx-hadapi-ancaman-gempa-akibat-sesar-lembang>
- Nursaniyah. (2020). Polisi Ciduk Puluhan Penjual Miras di Bandung Barat, Cimahi, dan Margaasih, Ribuan Botol Disita - Pikiran Rakyat Bandung Raya. *Pikiran Rakyat*.

- Rachmadi, A. (2020). Longsor di Tanjakan Curug Cimahi, Polisi Ungkap Adanya Pengalihan Arus Lalu Lintas - Pikiran-Rakyat. *Pikiran Rakyat*.
- Rafdinal, W., & Amalia, F. A. (2019). Pengaruh Islamic Tourism dalam Meningkatkan Word of Mouth Wisata Halal Sumatera Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1367–1373.
- Resdiana, E., & Sari, T. T. (2019). Penguatan Peran Triple Helix dalam Pariwisata Segitiga Emas di Pulau Gili Labak Madura. *Journal of Governance Innovation*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i2.342>
- Ridlwani, A.; Ramadhani, F. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 147–162.
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Suryana, M., & Utomo, S. R. S. (2020). Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(1), 40. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i1.1330>
- Widjajani, Fajarwati, A., & Hidayat, As. (2016). Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur). *Sosiohumanitas Journal. Jurnal-Jurnal Humaniora, Vol 18, No.1. Universitas Langlangbuana, Bandung.*, 85–95.
- Yawson, R. M. (2012). The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy. *SSRN Electronic Journal*, 33179. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1417676>